Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Dari Dapur ke Barikade: Studi Kasus tentang Solidaritas dan Perlawanan Perempuan terhadap Perampasan Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika pada Tahun 2024–2025

Budi Irawan[1], Gede Indra Pramana, S.IP., M.A.[2], Dr. Piers Andreas Noak, SH.,[3]

[123] Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universita Udayana

ARTICLE INFO

Article history:
Received September, 2025
Revised September, 2025
Accepted September, 2025
Available online September, 2025

budi.irawan057@student.unud.ac.id, indraprama@unud.ac.id, piersandreasnoak@unud.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah dinamika solidaritas dan perlawanan perempuan di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika terhadap perampasan tanah dan ruang hidup. Pembangunan pariwisata berbasis investasi menimbulkan kerentanan berlapis: hilangnya akses atas tanah, laut, dan padang penggembalaan mengikis sumber penghidupan, memperberat beban domestik, serta memperdalam eksklusi politik perempuan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus di tiga dusun terdampak, data diperoleh melalui wawancara, observasi partisipatif, serta dokumen sekunder, kemudian dianalisis menggunakan kerangka *new social movement theory* dan ekofeminisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan Mandalika membangun solidaritas lokal melalui praktik gotong royong, pertemuan rutin, dan aksi kolektif, yang kemudian diperluas lewat jejaring dengan organisasi perempuan, kelompok mahasiswa, serta Komnas Perempuan. Proses ini melahirkan identitas kolektif yang mentransformasi perempuan dari korban menjadi subjek politik dengan empat tuntutan utama: tidak adanya konsultasi bermakna, kegagalan relokasi, kompensasi tidak layak, dan absennya pemulihan sosial-ekonomi. Temuan menegaskan bahwa perjuangan perempuan Mandalika mencakup klaim atas hak hidup, martabat, dan keadilan agraria, serta menyoroti urgensi gender impact assessment, partisipasi bermakna, dan pembangunan alternatif yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: perempuan, Mandalika, solidaritas, gerakan sosial baru, ekofeminisme, keadilan agraria

ABSTRACT

This study explores the dynamics of solidarity and resistance among women living around the Mandalika Special Economic Zone (SEZ) in response to land dispossession and the loss of living spaces. Investment-driven tourism development has created multiple layers of vulnerability: the loss of access to land, sea, and grazing areas has eroded livelihoods, intensified domestic burdens, and reinforced women's political exclusion. Using a qualitative approach and a case study design in three affected hamlets, data were collected through interviews, participant observation, and secondary documents, and analyzed within the frameworks of new social movement theory and ecofeminism. The findings show that Mandalika women forged local solidarity through mutual aid, regular meetings, and collective action, which later expanded through networks with women's organizations, student groups, and the National Commission on Violence Against Women. This process fostered a collective identity that transformed women from victims into political subjects with four central demands: meaningful consultation, failed

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

resettlement, inadequate compensation, and absent socio-economic recovery. The study highlights that their struggle embodies claims for livelihood, dignity, and agrarian justice, while underscoring the urgency of gender impact assessment, meaningful participation, and alternative development that is fair, inclusive, and sustainable.
***Keywords**: women, Mandalika, solidarity, new social movements, ecofeminism, agrarian justice*

1. PENDAHULUAN

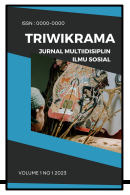
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mulai dijalankan sejak 2015. Penetapan kawasan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2014 dengan cakupan wilayah seluas 1.035,67 hektare dan garis pantai sepanjang 16 kilometer yang meliputi Desa Kuta, Mertak, Sengkol, dan Sukadana (Hanik, 2022). Selain ditetapkan sebagai kawasan pariwisata strategis daerah melalui Peraturan Daerah NTB No. 7 Tahun 2013, Mandalika juga masuk dalam koridor V Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta ditunjuk sebagai salah satu dari Lima Destinasi Super Prioritas nasional (Suryani, 2019). Pengelolaan kawasan dipercayakan kepada PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan dukungan investasi dan pinjaman, termasuk pembiayaan dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebesar USD 248,4 juta (AIIB, 2019). Total investasi yang diproyeksikan lebih dari USD 3 miliar difokuskan pada pembangunan infrastruktur, fasilitas pariwisata, serta pengelolaan sumber daya alam, dengan target meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan memperbesar kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (OHCHR, 2021).

Namun, di balik narasi pertumbuhan ekonomi, pembangunan Mandalika melahirkan persoalan agraria yang serius. Proses pembebasan lahan memicu praktik penggusuran paksa, intimidasi, dan minimnya partisipasi warga. Komnas HAM (2021) mendokumentasikan pelanggaran di Desa Sengkol dan Kuta, sedangkan survei Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KPPII, 2023) menunjukkan 98% masyarakat tidak pernah diajak berkonsultasi, 70% merasa dipaksa melepas tanah, dan 84% mengalami intimidasi aparat. Temuan Afra (2023) menegaskan dampak tersebut, di mana warga terdampak jatuh ke dalam pemiskinan struktural akibat relokasi, kehilangan lahan, dan terputusnya akses terhadap laut maupun padang penggembalaan. Kondisi ini lebih berat bagi perempuan Sasak yang sebelumnya berperan dalam produksi pangan, perdagangan kecil, serta pengelolaan sumber daya laut. Kehilangan tanah dan akses ekonomi membuat perempuan tersisih dari fungsi produksi sekaligus reproduksi sosial. Relokasi yang tidak menyediakan lahan penggembalaan maupun sarana air bersih memperparah beban domestik dan menimbulkan kerentanan kesehatan reproduksi. Hal ini menunjukkan adanya bias maskulin dalam proyek pembangunan yang menyingkirkan perempuan dari ruang konsultasi dan memperdalam ketidakadilan gender.

Dalam menghadapi marginalisasi struktural, perempuan di Lingkar Mandalika membangun solidaritas komunitas sebagai strategi perlawanan. Mereka mengorganisir diri melalui gotong royong, pertemuan tatap muka, dan aksi kolektif, serta memperluas jejaring dengan organisasi perempuan di Mataram, seperti Lingkar Studi Perempuan (LSP) dan Departemen Keperempuanan Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Mataram. Kolaborasi ini membuka ruang advokasi hingga ke tingkat nasional melalui koneksi dengan Komnas Perempuan, sehingga memperluas cakupan perjuangan dari isu lokal menjadi bagian dari agenda nasional mengenai keadilan agraria dan pemenuhan hak perempuan.

Fenomena perlawanan perempuan Mandalika dapat dipahami melalui pendekatan new social movement dan ekofeminisme. *New social movement* muncul sebagai pembaruan atas *old social movement* yang cenderung menekankan isu-isu material dan perjuangan kelas buruh. Jika gerakan lama berorientasi pada perubahan struktural melalui revolusi, maka new social movement lebih berfokus pada upaya memperjuangkan kualitas hidup, hak-hak sipil, serta isu-isu nonmaterial seperti lingkungan, feminisme, perdamaian, dan pluralitas identitas (Budiardjo, 2008). Pandangan ini kemudian diperkuat dengan penekanan bahwa gerakan sosial baru

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



menandai pergeseran orientasi gerakan dari aspek ekonomi menuju isu-isu kultural dan nilai-nilai simbolik (Hapsari, 2016).

new social movment bersifat lintas kelas sosial dan terbuka terhadap berbagai aktor yang berpartisipasi dalam proses demokratis. Sukmana (2016) menjelaskan bahwa kajian new social movement mencakup dua aliran penting. Pertama, *resource mobilization* yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya seperti modal, waktu, dan keterampilan sebagai faktor penentu keberhasilan gerakan. Oberschall menegaskan bahwa tanpa ketersediaan sumber daya, suatu gerakan sulit mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, *identity-oriented* yang melihat faktor ekspresif dan identitas kolektif sebagai basis solidaritas. Dalam kerangka ini, masyarakat dapat bersatu bukan semata karena kepentingan ekonomi, melainkan juga karena nilai, budaya, dan kesadaran politik. new social movement dengan demikian dapat dipahami sebagai refleksi atas perubahan masyarakat kontemporer yang menekankan pluralitas isu, rasionalitas tindakan kolektif, serta artikulasi nilai humanis, kultural, dan ekologis (Sari & Siahainenia, 2015).

Selain new social movment, perspektif ekofeminisme memberikan kerangka analisis yang penting untuk memahami resistensi perempuan terhadap pembangunan di Mandalika. Ekofeminisme berangkat dari asumsi bahwa penindasan terhadap perempuan memiliki keterkaitan erat dengan eksploitasi alam. Shiva dan Mies menekankan bahwa pembangunan modern seringkali mengabaikan etika ekologis, sehingga merusak lingkungan sekaligus meminggirkan perempuan (Khaeroni & Halidin, 2018). Perempuan, khususnya yang hidup di ranah domestik, memiliki kedekatan langsung dengan lingkungan sehingga merasakan dampak paling nyata dari krisis ekologis (Maulana & Supriatna, 2019). Puspita (2017) menambahkan bahwa pengalaman perempuan dalam pengelolaan rumah tangga dan lingkungan memberi mereka perspektif yang unik serta potensi kontribusi penting dalam pengambilan kebijakan ekologis.

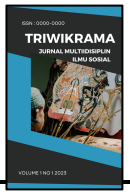
Karen J. Warren menjelaskan bahwa dominasi patriarki menciptakan dualisme antara subjek dan objek, di mana laki-laki ditempatkan sebagai subjek dominan, sementara perempuan dan alam direduksi sebagai objek yang dapat dieksploitasi (Kemmerer, 2001). Ekofeminisme berupaya mendekonstruksi paradigma tersebut dengan menekankan pentingnya kesetaraan dalam pengelolaan lingkungan serta perlunya transformasi pengetahuan dan ideologi agar lebih inklusif dan berkeadilan ekologis (Sharnappa, 2016). Dalam konteks pembangunan global, proyek-proyek yang berorientasi ekonomi kerap memicu konflik baru akibat perampasan sumber daya, kelangkaan pangan, dan hilangnya kedaulatan komunitas lokal (Priyatna dkk., 2017).

Dengan mengacu pada kerangka *new social movment* dan ekofeminisme, perlawanan perempuan Mandalika dapat dipahami tidak sebatas sebagai respon terhadap kehilangan tanah atau sumber ekonomi, melainkan juga sebagai strategi mempertahankan otonomi komunitas dan sistem sosial-ekologis yang diwariskan lintas generasi (Agarwal, 1994). Federici (2012) menekankan bahwa penguasaan tanah juga berfungsi sebagai benteng perlawanan terhadap hegemoni kapitalisme neoliberal. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan perempuan di Mandalika beroperasi dalam dua ranah sekaligus. Pertama, sebagai gerakan identitas yang menegaskan posisi perempuan dalam ruang politik lokal. Kedua, sebagai gerakan ekologis yang menentang logika kapitalisme neoliberal yang mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Sejauh ini, kajian mengenai konflik agraria di Mandalika lebih banyak menyoroti dinamika penguasaan tanah secara umum. Dimensi solidaritas dan resistensi perempuan masih jarang dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan solidaritas perempuan Sasak di Lingkar Mandalika sebagai fokus utama untuk menggali makna politik dari perlawanan mereka dalam bingkai n*ew social movement theory* dan ekofeminisme.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



TINJAUAN PUSTAKA

Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement Theory*)

Teori gerakan sosial baru lahir sebagai kritik terhadap paradigma klasik (*old social movement*) yang cenderung menitikberatkan pada perjuangan kelas buruh dan isu material semata. Budiardjo (2008) menegaskan bahwa orientasi gerakan sosial kontemporer tidak lagi terbatas pada tuntutan ekonomi, melainkan mencakup isu-isu yang bersifat kultural, simbolik, dan nilai-nilai universal seperti lingkungan, pluralitas identitas, serta hak asasi manusia. Pergeseran ini menunjukkan bahwa aksi kolektif modern lebih banyak dipicu oleh kesadaran akan kualitas hidup, partisipasi demokratis, serta hak-hak sipil ketimbang sekadar konflik kepentingan ekonomi.

Sukmana (2016) menguraikan dua arus utama dalam teori ini. Pertama, *resource mobilization theory*, yang menekankan pentingnya sumber daya seperti pengetahuan, jaringan, waktu, dan modal sosial sebagai penentu keberhasilan gerakan. Kedua, *identity-oriented theory*, yang menempatkan identitas kolektif dan nilai-nilai ekspresif sebagai dasar solidaritas antarindividu dalam komunitas yang beragam. Melalui pendekatan ini, partisipasi dalam gerakan tidak semata digerakkan oleh faktor struktural, tetapi juga oleh kesadaran politik dan emosi kolektif yang tumbuh dari pengalaman bersama menghadapi ketidakadilan (Melucci, 1996).

Dalam konteks Indonesia, sejumlah studi menunjukkan bahwa perempuan sering kali menjadi motor gerakan berbasis komunitas yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan kultural. Hendrastiti dan Irianto (2020) menemukan bahwa keberanian perempuan dalam menghadapi kebijakan yang eksklusif berakar dari pengalaman hidup sehari-hari yang sarat ketimpangan. Melalui pengorganisasian dan solidaritas, perempuan mampu mengubah posisi dari korban menjadi aktor politik. Dengan demikian, teori gerakan sosial baru memberikan kerangka konseptual yang tepat untuk membaca perjuangan perempuan Mandalika yang bertransformasi dari perlawanan lokal menuju advokasi kebijakan yang lebih luas.

Ekofeminisme

Selain analisis berbasis gerakan sosial, ekofeminisme menjadi kerangka teoretis penting dalam memahami keterkaitan antara penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi alam. Vandana Shiva dan Maria Mies (dalam Khaeroni & Halidin, 2018) berargumen bahwa model pembangunan modern yang maskulin dan antroposentris sering kali menyingkirkan nilai-nilai ekologis, sehingga merusak keseimbangan lingkungan sekaligus memperdalam marginalisasi perempuan. Mereka melihat bahwa krisis lingkungan dan ketimpangan gender memiliki akar yang sama, yakni logika patriarki dan kapitalisme yang menempatkan alam serta perempuan sebagai objek eksploitasi.

Karen J. Warren (dalam Kemmerer, 2001) menambahkan bahwa dominasi patriarki membentuk relasi dualistik antara subjek dan objek, di mana laki-laki diposisikan sebagai penguasa sementara alam dan perempuan direduksi menjadi entitas pasif. Ekofeminisme berupaya meruntuhkan pandangan ini dengan menegaskan pentingnya etika ekologis dan kesetaraan gender dalam setiap kebijakan pembangunan. Maulana dan Supriatna (2019) juga menyoroti bahwa perempuan, terutama yang terlibat dalam aktivitas domestik dan pengelolaan sumber daya lokal, memiliki kedekatan langsung dengan alam, sehingga mereka menjadi pihak pertama yang merasakan dampak degradasi lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah riset menegaskan peran strategis perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas. Puspita (2017) menunjukkan bahwa pengalaman perempuan dalam mengelola rumah tangga dan lingkungan memberi mereka perspektif unik dalam menyusun alternatif kebijakan ekologis. Fitri dan Akbar (2017) melalui studi di Pegunungan Kendeng juga menemukan bahwa gerakan perempuan berbasis ekofeminis

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

tidak hanya menolak proyek tambang semen, tetapi juga mengartikulasikan paradigma pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Federici (2012) yang menilai bahwa penguasaan tanah merupakan benteng perlawanan terhadap ekspansi kapitalisme neoliberal yang merampas ruang hidup komunitas.

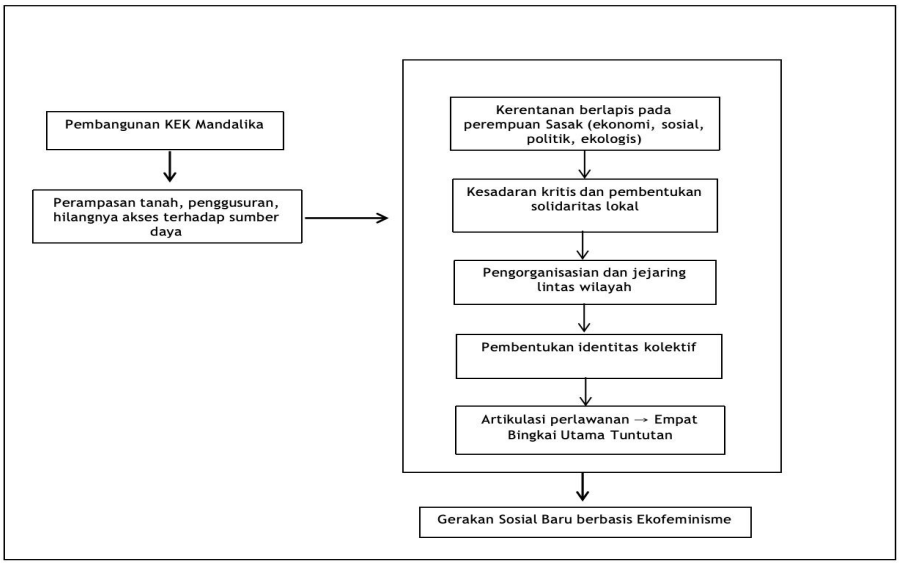
Gerakan Sosial Baru dalam Perspektif Ekofeminisme

Integrasi antara teori Gerakan Sosial Baru dan perspektif ekofeminisme melahirkan kerangka analisis yang mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana perempuan membangun resistensi terhadap proyek-proyek pembangunan yang menyingkirkan mereka dari ruang hidup. Gerakan sosial baru berbasis ekofeminisme memandang perjuangan perempuan bukan sekadar reaksi terhadap kehilangan sumber daya ekonomi, tetapi sebagai bentuk aksi politik yang berakar pada kesadaran identitas, solidaritas ekologis, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam gerakan jenis ini, perempuan berperan sebagai subjek yang mengartikulasikan pengalaman ekologis dan sosialnya ke dalam tuntutan politik yang lebih luas. Solidaritas yang terbentuk tidak hanya berdasar pada kepentingan ekonomi, melainkan pada nilai-nilai moral, spiritual, dan ekologis yang menegaskan keterhubungan antara manusia dan alam. Hal ini sejalan dengan pemikiran Melucci (1996), yang menekankan pentingnya pembentukan identitas kolektif sebagai inti dari aksi kolektif kontemporer.

Gerakan sosial baru berbasis ekofeminisme sering muncul di wilayah-wilayah yang mengalami tekanan struktural akibat pembangunan berorientasi kapital. Federici (2012) menegaskan bahwa perampasan tanah dan sumber daya publik (*commons*) merupakan strategi kapitalisme neoliberal untuk menguasai reproduksi sosial. Dalam konteks ini, perlawanan perempuan tidak hanya menolak penggusuran atau kehilangan akses ekonomi, tetapi juga mempertahankan keberlanjutan kehidupan komunitas.

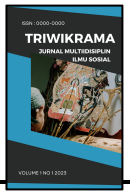
Gambar *Model New Social Movement Theory* Oleh Alberto Melucci



2. METODE

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dipilih karena mampu mengungkap dinamika sosial secara mendalam dan kontekstual (Creswell, 2013). Lokasi penelitian berfokus pada tiga dusun di lingkar KEK Mandalika, yaitu Dusun Ebunut (Desa Kuta), Dusun Molok Gerupuk, dan Dusun Ebangah (Desa Sengkol), yang menjadi pusat aktivitas perempuan terdampak pembangunan. Informan utama terdiri atas tujuh perempuan dengan latar belakang pedagang, petani, buruh rumput laut, serta tokoh organisasi perempuan, dilengkapi aktor kunci dari LSP Mataram, FMN, dan Komnas Perempuan. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan peran strategis mereka. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif maupun non-partisipatif, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan masyarakat sipil, media alternatif, dan arsip digital. Analisis dilakukan secara tematik dengan kerangka Gerakan Sosial Baru serta perspektif ekofeminisme, sementara validitas dijaga melalui triangulasi metode dan sumber. Aspek etika penelitian diperhatikan melalui *informed consent* dan perlindungan hak informan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pembangunan KEK Mandalika terhadap Perempuan

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika telah menghasilkan perubahan yang tidak terbatas pada aspek fisik wilayah, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat Sasak. Dampak ini secara khusus dirasakan oleh kelompok perempuan yang memiliki keterhubungan erat dengan tanah, laut, padang penggembalaan, serta sumber daya lokal lainnya. Sumber daya tersebut sejak lama menjadi basis utama penghidupan melalui aktivitas produksi pangan, pengolahan hasil laut, pertanian kecil, dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, ruang hidup perempuan tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, melainkan juga sebagai ranah sosial dan kultural yang menopang peran ganda mereka, baik produktif maupun reproduktif.

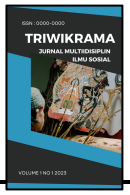
Data lapangan menunjukkan bahwa pembangunan KEK Mandalika memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi perempuan. Berbagai kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara berkelanjutan, seperti pengolahan rumput laut, perdagangan kecil di pesisir, dan pengelolaan lahan pertanian, mengalami hambatan akibat perubahan fungsi ruang pesisir. Pembangunan yang berorientasi pada pariwisata berbasis investasi pada akhirnya menutup akses terhadap sumber penghidupan tradisional, sementara kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi baru relatif terbatas.

Hal tersebut tercermin dalam wawancara dengan Inak Is, seorang buruh tani rumput laut di Dusun Sengkol, yang menyatakan:

> *"Sebelum pembangunan KEK, saya sehari-hari mengolah rumput laut di pesisir Dusun Ebangah… Setelah proyek mulai berjalan, akses kami ke lahan laut mulai dibatasi. Banyak area yang dulu kami gunakan sekarang tidak boleh lagi digunakan dan sudah berubah fungsi. Ini membuat pekerjaan saya menjadi sulit dan penghasilan menurun drastis."* (Inak Is, 23 Mei 2025).

Situasi serupa juga dialami Kartini, seorang pedagang di pesisir Pantai Tanjung Aan. Sebelum hadirnya proyek pembangunan KEK Mandalika, aktivitas ekonominya berjalan stabil dengan penghasilan yang relatif tinggi. Kartini mengandalkan akses penuh ke kawasan pantai sebagai ruang berdagang, ditopang dengan kondisi lingkungan yang aman dan tanpa gangguan. Sejak tahun 2016, perubahan mulai terjadi seiring dengan masuknya kebijakan pembangunan yang dibawa oleh ITDC. Lingkungan kerja yang sebelumnya kondusif berubah menjadi ruang yang penuh tekanan akibat berbagai intervensi, seperti penembokan di sekitar kawasan pantai, pembatasan terhadap pasokan listrik dan air bersih, serta munculnya suara bising dari aktivitas sirkuit.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Faktor-faktor tersebut secara langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari. Penembokan membatasi ruang fisik yang selama ini digunakan untuk berdagang, sementara keterbatasan listrik dan air bersih menghambat pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga maupun aktivitas ekonomi. Gangguan suara dari motor balap di sekitar sirkuit menambah tekanan dalam aktivitas berdagang, yang sebelumnya dapat dilakukan dalam suasana tenang. Di luar itu, ancaman penggusuran yang berulang juga menimbulkan rasa tidak aman yang berkelanjutan, menjadikan kondisi kerja dan kehidupan keluarga jauh lebih rentan dibandingkan sebelumnya. Kartini menegaskan perubahan yang ia alami dalam wawancara berikut:

> *"Kehidupan saya sebelum kehadiran ITDC di sini sangat aman tanpa gangguan seperti saat ini… tempat saya dapat menghasilkan 30 juta/hari. Tapi setelah adanya pembangunan yang masif dari tahun 2016 sampai saat ini justru kami dibayang-bayangi dengan ancaman penggusuran… mulai dari penembokan di sekitar pantai, pembatasan listrik dan air bersih serta suara-suara gangguan dari motor balap di sirkuit."* (Kartini, 23 Mei 2025).

Selain berdampak pada sektor ekonomi, pembangunan KEK Mandalika juga berimplikasi pada keterasingan sosial yang dialami oleh perempuan. Ruang publik yang sebelumnya menjadi arena interaksi sosial, seperti pantai, ladang, dan padang penggembalaan, kini mengalami alih fungsi sehingga akses perempuan semakin terbatas. Hilangnya ruang publik tidak hanya mengurangi peluang untuk melakukan aktivitas ekonomi, tetapi juga membatasi interaksi sosial yang selama ini menopang solidaritas komunitas.

Hanum, anggota AGRA Ranting Mandalika sekaligus warga terdampak, menguraikan pengalamannya sebagai berikut:

> *"Saya hanya merefleksikan pengalaman saya, sepengalaman saya hidup jadi lebih terisolir, mau kemana-mana itu susah. Kalau dulu lebih luas bisa ke pantai untuk berjualan, tapi kalau sekarang sudah tidak bisa mau kemana-mana susah." (*Hanum, 23 Mei 2025).

Lebih lanjut, Hanum juga menjelaskan pengalaman terkait penggusuran yang menimbulkan trauma kolektif:

> *"… Sejak digusur pada tahun 2014 sampai saat ini saya sudah digusur sebanyak 3 kali tapi masih tetap tinggal di sini… saat penggusuran pertama terkumpul sebanyak 10 orang, itupun hanya keluarga, kalau yang diperkirakan jumlah polisi pada waktu itu dan tentara itu sekitar 50 orang."* (Hanum, 23 Mei 2025).

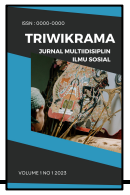
Empat Bingkai Utama Tuntutan Perempuan Mandalika

Perlawanan perempuan Mandalika berakar pada pengalaman langsung menghadapi dampak pembangunan KEK yang menyingkirkan mereka dari tanah, laut, dan ruang hidup yang selama ini menopang keberlangsungan komunitas. Hilangnya sumber penghidupan, penggusuran yang berulang, serta tidak adanya pelibatan dalam proses pengambilan keputusan menimbulkan kesadaran kolektif bahwa mereka tidak sekadar menghadapi persoalan ekonomi, melainkan juga ketidakadilan politik dan sosial. Pengalaman bersama ini mendorong perempuan untuk membangun solidaritas, mengorganisir diri, dan menjadikan perlawanan sebagai sarana mempertahankan hak atas tanah dan ruang hidup.

Dari pengorganisasian dan refleksi kolektif inilah lahir kesadaran bahwa perjuangan tidak bisa berjalan tanpa kerangka tuntutan yang jelas dan terarah. Empat bingkai utama kemudian dirumuskan sebagai dasar politik bersama, yang tidak hanya berfungsi menjaga konsistensi gerakan di tingkat lokal, tetapi juga memperkuat posisi tawar mereka terhadap negara dan korporasi. Dengan demikian, perlawanan perempuan Mandalika tidak berhenti pada reaksi spontan terhadap pembangunan, melainkan berkembang menjadi gerakan yang terstruktur dan

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



konsisten dengan landasan tuntutan yang disepakati bersama. Soleha, Ketua LSP Mataram menyatakan:

> *"Ada empat hal yang menjadi bingkai utama perjuangan. Pertama, tidak ada konsultasi bermakna dengan masyarakat. Kedua, janji pemukiman kembali tidak pernah terealisasi. Ketiga, kompensasi yang diberikan tidak layak. Keempat, tidak ada pemulihan ekonomi maupun kehidupan sosial pasca-penggusuran. Empat bingkai ini disepakati sebagai tuntutan bersama perempuan Lingkar Mandalika."* (Soleha, 21 September 2025).

Empat bingkai ini menjadi rujukan bersama dalam setiap aksi kolektif yang dilakukan perempuan Mandalika. Bingkai tersebut tidak semata-mata merekam pengalaman kehilangan, melainkan berfungsi sebagai kerangka politik yang mengartikulasikan persoalan struktural. Tidak adanya konsultasi bermakna menegaskan eksklusi politik yang sistematis, janji pemukiman kembali yang gagal menunjukkan lemahnya tanggung jawab negara dan korporasi, kompensasi yang tidak adil mencerminkan praktik ketidaksetaraan ekonomi, sementara ketiadaan pemulihan ekonomi dan sosial memperlihatkan kerentanan berlapis yang menjerat perempuan. Dengan demikian, kerentanan perempuan tidak hanya terletak pada hilangnya ruang ekonomi, tetapi juga pada rusaknya struktur sosial yang selama ini menopang keberlangsungan komunitas. Artinya, empat bingkai tuntutan tidak dapat dipahami sebagai daftar keluhan teknis, melainkan sebagai kerangka perjuangan politik yang menegaskan perlunya pendekatan pembangunan yang sensitif terhadap gender. Sebagaimana ditegaskan Soleha, ketua LSP Mataram:

> *"Dalam kasus ini, perempuan bukan hanya kehilangan fungsi produksi, mereka tidak bisa lagi menjual hasil laut atau mengelola ladang, tetapi juga kehilangan fungsi reproduksi sosial, karena sumber air dan padang penggembalaan hilang bersamaan. Situasi seperti ini jelas menunjukkan perlunya Penilaian Dampak Gender (Gender Impact Assessment/GIA). Tanpa GIA, kita tidak akan bisa melihat secara komprehensif bagaimana pembangunan justru meruntuhkan peran ekonomi sekaligus tatanan sosial yang menopang kehidupan perempuan."* (Soleha, 21 September 2025).

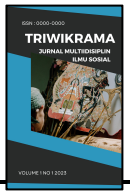
Jejaring Lintas Wilayah dan Advokasi Perempuan

Perlawanan perempuan Mandalika tidak dapat dilepaskan dari jejaring lintas wilayah yang memperkuat posisi mereka dalam menghadapi negara dan korporasi. Jejaring ini mencakup organisasi di tingkat lokal, regional, nasional, hingga lembaga negara independen. Keterhubungan tersebut menghadirkan ruang advokasi yang lebih luas, sehingga persoalan perampasan tanah, hilangnya ruang hidup, serta kerentanan perempuan tidak berhenti sebagai isu lokal semata. Dukungan dari organisasi perempuan, kelompok mahasiswa, hingga Komnas Perempuan memungkinkan suara perempuan Mandalika terdengar lebih luas dan diakui sebagai bagian dari problem struktural yang menyangkut hak asasi manusia.

Melalui jejaring ini, perjuangan perempuan Mandalika ditempatkan sebagai bagian dari agenda yang lebih besar mengenai keadilan agraria dan hak perempuan, sehingga memperluas jangkauan advokasi sekaligus memperkuat daya tawar mereka. Jaringan tersebut bukan hanya menghubungkan pengalaman lokal dengan wacana nasional, tetapi juga mengintegrasikan perlawanan perempuan Mandalika ke dalam gerakan yang lebih luas. Dengan cara ini, isu yang berawal dari pengalaman sehari-hari memperoleh pengakuan sebagai persoalan struktural pembangunan yang membutuhkan perhatian publik, politik, dan hukum. Kehadiran jejaring lintas wilayah juga membuka akses ke beragam dukungan, mulai dari pendampingan hukum, pendidikan politik, hingga kampanye di tingkat nasional. Soleha dari LSP Mataram menuturkan:

> *"Kami menghubungkan perempuan Mandalika dengan organisasi di tingkat lokal, nasional, hingga Komnas Perempuan. Dengan begitu, perlawanan ini tidak hanya dilihat sebagai isu*

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



lokal, tetapi juga menjadi bagian dari agenda nasional tentang keadilan agraria dan hak perempuan." (Soleha, 21 September 2025).

Keberhasilan jaringan ini tampak nyata ketika Komnas Perempuan hadir langsung di Mandalika. Keterlibatan lembaga negara independen tersebut menunjukkan bahwa perjuangan perempuan Mandalika berhasil menembus batas komunitas lokal dan memperoleh perhatian pada tingkat nasional. Kehadiran Komnas Perempuan menjadi penanda penting, karena selain mendengarkan langsung pengalaman perempuan terdampak, mereka juga mencatat berbagai bentuk kekerasan fisik maupun psikis yang dialami masyarakat. Dengan demikian, jejaring yang dibangun tidak hanya menghadirkan solidaritas, tetapi juga membuka kanal advokasi formal yang lebih kuat.

"kedatangan Komnas Perempuan ke sini untuk mengetahui secara langsung keadaan perempaun yang ada di Lingkar Mandalika, bagaimana dampak pembangunan kawasan ini terhadap perempuan dan kami melakukan wawancara dengan perempuan, bagaimana situasi perempuan, kekerasan yang di alami baik fisik maupun sikis serta akan membuat report atas kunjungan ini." (Komnas Perempuan, 27 Mei 2025).

"Kehadiran Komnas Perempuan ini menjadi satu lembaga yang juga berbicara tentang apa yang menjadi permasalahan warga dan apa yang dinginkan warga. Inilah salah satu bentuk dukungan dari Komnas Perempuan terhadap perjuangan warga terdampak dan tentu saja Komnas Perempuan berbicara terhadap masalah yang di alam dan menyampaikan aspirasi warga di sini utamanya perempuan" (Komnas Perempuan, 27 Mei 2025).

Identitas Kolektif dan Makna Politik Perlawanan

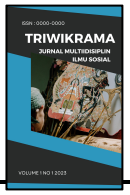
Perlawanan perempuan Mandalika menunjukkan adanya transformasi penting dari gerakan lokal yang berangkat dari pengalaman sehari-hari menuju praktik politik yang berakar pada identitas kolektif. Identitas tersebut tidak lahir secara instan, melainkan terbentuk dari proses panjang ketika perempuan berhadapan dengan berbagai bentuk ketidakadilan, mulai dari penggusuran berulang, hilangnya tanah dan laut sebagai sumber utama penghidupan, hingga penyingkiran mereka dari ruang-ruang pengambilan keputusan. Situasi ini perlahan membentuk kesadaran bersama bahwa persoalan yang mereka hadapi tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut hak hidup, martabat, dan ruang sosial budaya yang selama ini menopang komunitas.

Identitas kolektif yang terbangun kemudian menjadi fondasi bagi perlawanan, karena memberikan arah moral sekaligus energi simbolik untuk melawan dominasi negara dan korporasi. Lebih dari sekadar mempertahankan tanah dan laut, perempuan Mandalika menegaskan diri mereka sebagai penjaga ruang hidup yang memiliki keterikatan erat dengan ekologi dan nilai-nilai budaya. Identitas ini memperlihatkan bahwa perjuangan mereka tidak dapat dipisahkan dari relasi sosial dan simbolik yang telah dibangun secara turun-temurun. Dengan demikian, perlawanan perempuan Mandalika bukan hanya respons atas kehilangan ekonomi, melainkan representasi perjuangan eksistensial yang menegaskan hak atas ruang hidup dan masa depan komunitas. Soleha, ketua LSP Mataram menegaskan:

"Gerakan perempuan Mandalika adalah wujud identitas kolektif. Mereka tidak hanya menuntut ganti rugi, tetapi memperjuangkan hak hidup dan identitas mereka sebagai penjaga ruang ekologis. Solidaritas simbolik dan nilai budaya menjadi fondasi perjuangan ini, sesuai dengan karakter gerakan sosial baru." (Soleha, 21 September 2025).

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Bentuk identitas kolektif ini tampak nyata dalam praktik perlawanan sehari-hari, di mana aktivitas rutin perempuan di lingkar KEK Mandalika tidak lagi dipandang sekadar sebagai kegiatan domestik atau ekonomi, melainkan juga sebagai ekspresi politik. Berjualan di sekitar pantai, merawat sisa lahan yang masih bisa ditanami, atau sekadar bertahan di rumah-rumah mereka yang terancam penggusuran menjadi simbol keberlanjutan eksistensi sekaligus penolakan terhadap narasi pembangunan yang menyingkirkan. Kehadiran perempuan di ruang konflik ini merupakan strategi politik untuk menolak penghapusan identitas mereka sebagai penjaga ruang hidup, serta bentuk perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang berusaha meminggirkan keberadaan komunitas.

Dengan demikian, bertahan di tanah sendiri tidak hanya berarti menolak relokasi atau penggusuran, tetapi juga menegaskan klaim atas ruang yang secara historis telah diwariskan dan dirawat oleh komunitas. Dalam konteks Mandalika, diam atau tetap tinggal menjadi aksi politik tersendiri, karena setiap aktivitas yang dilakukan di wilayah konflik dipandang sebagai tanda keberlangsungan perlawanan. hanum menuturkan:

> *"Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan itu adalah tetap beraktivitas seperti biasa, karena ini adalah wilayah konflik jadi apapun aktivitasnya sesederhana apapun itu pasti dianggap sebagai aktivitas politik. Jadi mau berjualan, atau lainnya adalah aktivitas politik. Jadi kalau yang mempengaruhi tingkat keberhasilan disini ya karena masih bertahan disini, karena diam itu adalah bentuk perlawanan."* (hanum, 23 Mei 2025).

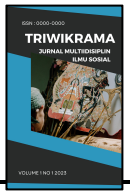
Bahasa perjuangan yang dipakai perempuan Mandalika menunjukkan pergeseran penting dari ekspresi spontan menuju framing politik yang lebih terarah. Pada awalnya, perlawanan sering dinyatakan melalui ungkapan sederhana seperti "tidak mau pindah" atau "menolak digusur," tetapi seiring meningkatnya kesadaran kolektif dan pengorganisasian, bahasa yang digunakan bergeser menjadi lebih politis dengan menyebut kondisi mereka sebagai "perampasan tanah." Pergeseran istilah ini tidak sekadar perubahan semantik, melainkan strategi sadar untuk memberikan bobot politik pada pengalaman mereka sekaligus memperkuat legitimasi gerakan di mata publik dan jejaring advokasi. Dengan memilih istilah "perampasan tanah," perempuan Mandalika menempatkan perjuangan mereka dalam kerangka yang lebih luas, yakni isu agraria dan hak asasi manusia, sehingga pengalaman lokal tidak lagi hanya dipahami sebagai persoalan ganti rugi atau konflik lahan, tetapi juga sebagai bagian dari problem struktural yang menuntut keadilan sosial. Bahasa politik yang lahir dari pengalaman kolektif ini berfungsi sebagai senjata simbolik yang mempertegas posisi mereka sebagai subjek perjuangan. Hanum, salah seorang warga terdampak, menjelaskan:

> *"Jadi sekarang kalau ngomong, kami tidak hanya bicara menolak pindah, tapi kami sebut ini sebagai perampasan tanah. Itu sudah jadi bahasa perjuangan kami."* (hanum, 23 Mei 2025).

Lebih jauh, perlawanan ini juga menandai adanya pergeseran posisi perempuan dari sekadar korban pembangunan menjadi subjek politik yang aktif. Jika pada awalnya perempuan ditempatkan dalam posisi pasif, hanya dipandang sebagai pihak yang terdampak oleh kebijakan pembangunan, maka kini mereka tampil sebagai aktor utama yang menyusun strategi, merumuskan tuntutan, dan memimpin aksi kolektif. Pergeseran ini menunjukkan bahwa perjuangan perempuan Mandalika tidak berhenti pada persoalan kompensasi ekonomi atau ganti rugi material, melainkan berkembang menjadi penegasan hak politik yang lebih fundamental. Identitas kolektif yang lahir dari pengalaman bersama menghadapi penggusuran, intimidasi aparat, serta hilangnya sumber-sumber penghidupan menjadi dasar bagi perempuan untuk mengartikulasikan diri sebagai subjek yang berhak menentukan masa depan ruang hidupnya.

Transformasi ini juga menggambarkan dinamika penting dalam gerakan sosial kontemporer. Perempuan tidak lagi hanya menyuarakan kebutuhan praktis, tetapi juga

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



mengartikulasikan tuntutan strategis yang berkaitan dengan keadilan agraria, hak atas tanah, dan pengakuan terhadap eksistensi mereka sebagai penjaga ruang hidup. Dengan kata lain, posisi mereka bergeser dari objek yang dipolitisasi oleh pembangunan menjadi agen yang secara sadar mempolitisasi pengalaman kolektif mereka. Baiq Eentika, Kepala Departemen Keperempuanan FMN Cabang Mataram menekankan:

> *"Perjuangan perempuan tidak sekadar menuntut ganti rugi materi atau kompensasi ekonomi, tetapi menegaskan identitas kolektif sebagai perempuan yang berhak atas ruang hidup, tanah, dan laut yang sejak lama mereka rawat. Identitas kolektif ini lahir dari pengalaman bersama menghadapi penggusuran, intimidasi aparat, hingga hilangnya sumber-sumber penghidupan."* (Baiq Eentika, 21 September 2025).

Makna politik dari perlawanan ini juga terletak pada upaya perempuan Mandalika untuk menegaskan bahwa isu agraria tidak dapat direduksi semata sebagai soal tanah atau ekonomi, melainkan juga berkaitan erat dengan martabat, identitas, dan hak asasi manusia. Kehilangan tanah dan laut bukan hanya berarti hilangnya sumber pendapatan, tetapi juga terputusnya ikatan sosial, budaya, dan spiritual yang melekat pada ruang hidup mereka. Oleh karena itu, perlawanan perempuan Mandalika dapat dipahami sebagai usaha kolektif untuk menjaga kesinambungan komunitas sekaligus menuntut pengakuan atas posisi mereka sebagai subjek yang sah dalam proses pembangunan.

Dalam konteks ini, perempuan tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang pasif atau sekadar korban kebijakan pembangunan, melainkan sebagai agen yang sadar akan posisinya dalam perjuangan keadilan sosial. Kesadaran ini terlihat dalam cara mereka mengorganisir diri, menyusun kerangka tuntutan, dan membangun solidaritas lintas wilayah. Perlawanan yang mereka jalankan bukan hanya respons sesaat, tetapi menjadi strategi politik jangka panjang untuk memperjuangkan hak asasi dan mempertahankan eksistensi mereka sebagai penjaga ruang hidup.

> *"Bagi kami, ini menunjukkan bahwa perempuan Mandalika tidak sekadar korban pembangunan, tetapi subjek politik yang sadar akan posisinya. Gerakan mereka membuktikan bahwa isu agraria bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan martabat, identitas, dan hak asasi manusia."* (Baiq Eentika, 21 September 2025).

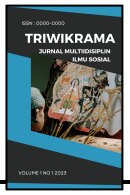
PEMBAHASAN

Kerentanan Berlapis Perempuan Mandalika akibat Kehilangan Ruang Hidup

Perempuan di lingkar Mandalika menghadapi kerentanan berlapis akibat hilangnya akses atas tanah dan laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Kehilangan tersebut tidak hanya melemahkan kemandirian ekonomi, tetapi juga mengikis ruang publik yang berfungsi sebagai basis solidaritas sosial. Praktik penggusuran dan intimidasi aparat menimbulkan trauma psikologis yang memperdalam ketidakpastian hidup sehari-hari. Agarwal (1994) menekankan pentingnya kepemilikan tanah bagi posisi tawar perempuan, sedangkan Federici (2012) menguraikan perampasan commons dalam kerangka neoliberal sebagai faktor melemahnya basis reproduksi sosial komunitas. Konteks Indonesia memperlihatkan pola serupa, misalnya temuan Pintakami dkk. (2024) mengenai marginalisasi kontribusi perempuan pesisir dalam ketahanan pangan, serta Wardhani dkk. (2023) yang menegaskan bahwa perempuan nelayan kecil masih terikat dalam struktur patriarki meskipun berperan besar dalam ekonomi lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata berorientasi investasi, seperti di KEK Mandalika, justru melanggengkan ketidakadilan gender melalui absennya skema pemberdayaan yang setara dan mekanisme konsultasi yang hanya bersifat formalitas.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Situasi eksklusi ini dapat dipahami dalam kerangka n*ew social movement* yang menekankan aspek identitas, nilai-nilai non-material, dan ekspresi solidaritas lintas kelas. *New social movement* berkembang dari kesadaran kolektif yang lahir dari pengalaman sehari-hari masyarakat menghadapi ketidakadilan struktural (Budiardjo, 2008; Sukmana, 2016). Melucci (1996) menegaskan bahwa pembentukan identitas kolektif merupakan inti gerakan sosial baru, sementara Hendrastiti dan Irianto (2020) menunjukkan bagaimana pengalaman perempuan dalam menghadapi kebijakan yang eksklusif mampu melahirkan kesadaran kritis dan keberanian kolektif. Perempuan Mandalika, yang awalnya diposisikan sebagai korban pembangunan, justru merumuskan identitas politik baru sebagai subjek aktif. Resistensi mereka bukan semata soal mempertahankan tanah, melainkan juga upaya membangun solidaritas dan kesadaran kolektif untuk melawan dominasi negara dan korporasi. Dengan demikian, perlawanan ini mencerminkan karakteristik n*ew social movement* yang lebih menonjolkan isu demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia daripada semata tuntutan material.

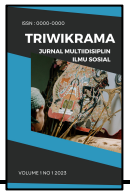
Lebih jauh, dinamika resistensi perempuan Mandalika dapat dibaca melalui perspektif ekofeminisme yang menyoroti keterkaitan antara eksploitasi alam dan penindasan perempuan. Vandana Shiva dan Mies, sebagaimana dijelaskan Khaeroni dan Halidin (2018), menekankan bahwa pembangunan yang abai terhadap etika lingkungan akan menghancurkan ekologi sekaligus meminggirkan perempuan. Maulana dan Supriatna (2019) menunjukkan bahwa perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan, meskipun pengalaman mereka di ranah domestik memberi kontribusi penting bagi ekologi. Puspita (2017) menambahkan bahwa perspektif perempuan dapat menghadirkan sudut pandang alternatif dalam kebijakan lingkungan yang selama ini didominasi laki-laki. Karen J. Warren dalam Kemmerer (2001) menyebut dominasi patriarki membangun pola subordinasi antara perempuan dan alam, yang keduanya sama-sama dijadikan objek eksploitasi. Melalui kerangka ini, dapat dipahami bahwa perempuan Mandalika menanggung beban ganda: kehilangan sumber daya alam sekaligus marginalisasi sosial. Namun, pengalaman kolektif tersebut justru melahirkan solidaritas baru yang memperkuat identitas perlawanan. Dengan demikian, perempuan Mandalika tidak hanya tampil sebagai korban pembangunan, tetapi juga sebagai motor penggerak gerakan sosial baru berbasis ekofeminis yang memperjuangkan keadilan gender, ekologis, dan sosial.

Transformasi Identitas Politik

Solidaritas perempuan Mandalika tumbuh dari akumulasi pengalaman kolektif menghadapi penggusuran, intimidasi aparat, serta hilangnya ruang hidup yang menopang komunitas mereka. Solidaritas ini tidak sekadar bersifat emosional, tetapi terwujud nyata melalui praktik sehari-hari, pengorganisasian lokal, hingga keterlibatan aktif dalam advokasi dan aksi lapangan. Melalui proses ini, perempuan terdampak berhasil mengubah posisi mereka dari korban pembangunan menjadi aktor politik yang memperjuangkan hak atas tanah dan ruang hidup. Melucci (1996) menegaskan bahwa pengalaman kolektif mampu melahirkan identitas bersama, sementara Touraine (1985) menekankan bahwa identitas tersebut berfungsi memperkuat solidaritas politik dalam menghadapi dominasi negara maupun korporasi. Roviana (2015) menunjukkan bagaimana solidaritas menjadi energi sosial bagi perempuan marjinal, meski Törnquist (2006) mengingatkan potensi kerapuhan jika tidak disertai strategi politik yang luas. Dalam konteks Mandalika, jaringan eksternal bersama LSP Mataram, AGRA NTB, FMN, dan LSBH NTB turut memperluas ruang politik perempuan dengan menghubungkan pengalaman lokal ke agenda nasional, sekaligus mengubah penderitaan personal menjadi perjuangan politik kolektif.

Dinamika ini dapat dipahami melalui kerangka *new social movement* yang muncul sebagai pembaharuan dari teori gerakan sosial klasik. Tidak seperti old social movement yang terikat pada kelas buruh dan berfokus pada isu material, *new social movement* bergerak lintas kelas dengan menekankan nilai-nilai ekspresif, identitas kolektif, serta perjuangan melalui mekanisme

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



demokrasi (Budiardjo, 2008; Sukmana, 2016). *resource mobilization theory* menekankan pentingnya sumber daya seperti harta, waktu, dan kemampuan, sedangkan identity-oriented theory menyoroti faktor non-material sebagai pemicu solidaritas, misalnya dalam gerakan feminisme, perdamaian, atau lingkungan. Gerakan sosial baru juga tidak tertarik pada ide revolusi, melainkan pada pluralitas isu, mulai dari anti-rasisme, feminisme, hingga lingkungan hidup (Hapsari, 2016). Perspektif ini membantu menjelaskan bahwa resistensi perempuan Mandalika bukan semata-mata respons terhadap kehilangan sumber daya ekonomi, melainkan lahir dari kesadaran kolektif akan problem struktural yang menyingkirkan mereka dari ruang publik. Dengan demikian, solidaritas perempuan Mandalika dapat dipandang sebagai representasi gerakan sosial baru yang berbasis identitas, demokrasi, dan nilai-nilai universal tentang keadilan sosial.

Lebih jauh, solidaritas tersebut memiliki kedekatan dengan perspektif ekofeminisme yang menyoroti keterkaitan antara eksploitasi alam dan penindasan terhadap perempuan. Shiva dan Mies, sebagaimana dijelaskan Khaeroni dan Halidin (2018), menegaskan bahwa pembangunan yang abai terhadap etika lingkungan akan menghancurkan ekologi sekaligus meminggirkan perempuan. Maulana dan Supriatna (2019) mengkritik minimnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait ekologi, padahal pengalaman domestik mereka menghadirkan pengetahuan penting dalam pengelolaan lingkungan. Puspita (2017) menambahkan bahwa perspektif perempuan memberi alternatif dalam perumusan kebijakan yang selama ini didominasi laki-laki. Warren dalam Kemmerer (2001) bahkan melihat adanya relasi dominasi serupa antara perempuan dan alam dalam konstruksi patriarki. Kerangka ini membantu membaca bagaimana perempuan Mandalika, yang menanggung dampak langsung hilangnya tanah dan laut, sekaligus menghadapi marginalisasi sosial. Namun, pengalaman tersebut justru melahirkan kesadaran kritis dan solidaritas politik yang memperkuat perlawanan. Dengan demikian, resistensi perempuan Mandalika tidak hanya merupakan gerakan lokal mempertahankan ruang hidup, tetapi juga refleksi ekofeminisme yang menghubungkan isu keadilan gender, ekologi, dan demokrasi yang mengubah pengalaman personal menjadi perjuangan politik kolektif di ruang publik yang melahirkan framing sekaligus tuntutan utama perlawanan perempuan terdampak proyek pembangunan KEK Mandalika.

Fungsi *Framing S*ebagai Strategi Resistensi dan Alat Advokasi

perempuan Mandalika memperlihatkan bahwa pengalaman kehilangan tanah, laut, dan ruang hidup tidak berhenti sebagai derita individual, melainkan diolah menjadi kerangka perjuangan kolektif. Bingkai tersebut mencakup ketiadaan konsultasi bermakna, kegagalan pemukiman kembali, kompensasi yang tidak adil, serta absennya pemulihan ekonomi-sosial. Tuntutan ini menegaskan bahwa persoalan yang mereka hadapi bukan sekadar teknis, tetapi merupakan pelanggaran atas prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia. Pergeseran dari posisi sebagai objek terdampak menuju subjek politik menunjukkan kemampuan perempuan untuk mengartikulasikan strategi kolektif. Komnas Perempuan (2025) bahkan menegaskan bahwa absennya partisipasi bermakna dalam pembangunan Mandalika merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip partisipasi yang dijamin oleh *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) maupun Undang-Undang Dasar 1945.

Bingkai tersebut juga mengungkap lemahnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam menjamin keadilan distributif. Kegagalan pemukiman kembali dan kompensasi yang tidak layak menunjukkan bahwa masyarakat Mandalika dipaksa kehilangan tanah dan mata pencaharian tanpa mekanisme relokasi sukarela (Walhi, 2024). Absennya pemulihan ekonomi-sosial memperlihatkan rusaknya struktur komunitas sekaligus terpinggirkannya pengetahuan lokal

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

perempuan. Hal ini sejalan dengan peringatan *World Bank* (2019) bahwa pembangunan yang tidak peka gender memperdalam kerentanan perempuan, serta penelitian Pintakami dkk. (2024) dan Wardhani dkk. (2023) yang menyoroti pentingnya peran perempuan pesisir dalam ketahanan pangan namun sering terpinggirkan.

Dengan demikian, empat bingkai tuntutan ini berfungsi menjaga arah gerakan, memperkuat posisi tawar perempuan terhadap negara dan korporasi, serta membuka ruang bagi jejaring advokasi lintas wilayah. Sejalan dengan Hendrastiti dan Irianto (2020), resistensi perempuan lahir dari pengalaman kerentanan yang kemudian diartikulasikan dalam tuntutan kolektif sebagai strategi politik. Dalam konteks Mandalika, bingkai tersebut menjadi dasar politik lokal sekaligus pijakan strategis untuk advokasi di tingkat nasional maupun internasional.

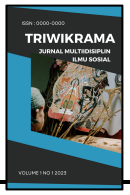
Transformasi Isu Lokal Menjadi Agenda Politik yang Lebih Luas

Keterlibatan Komnas Perempuan dalam jaringan advokasi memberi legitimasi penting bagi perjuangan perempuan Mandalika. Kehadiran lembaga negara independen ini memungkinkan pengalaman penggusuran, kehilangan ruang hidup, dan kerentanan gender yang sebelumnya dianggap persoalan lokal diartikulasikan sebagai isu struktural yang menuntut tanggung jawab negara. Perspektif keadilan gender menegaskan bahwa ketidakadilan tidak hanya bersumber dari relasi patriarki, tetapi juga dari struktur pembangunan eksploitatif yang mengabaikan prinsip non-diskriminasi (Fraser, 2008). Catatan Komnas Perempuan (2025) menyoroti bahwa praktik penggusuran paksa tanpa konsultasi bermakna merupakan pelanggaran prinsip keadilan substantif sebagaimana dijamin dalam CEDAW dan UUD 1945. Di titik ini, jejaring advokasi berfungsi sebagai ruang tandingan terhadap narasi pembangunan berbasis investasi yang hegemonik, sekaligus arena bagi perempuan untuk mengartikulasikan pengalaman mereka sebagai isu politik yang sah (Kecek, 2014).

Dalam kerangka n*ew social movement* gerakan perempuan Mandalika mencerminkan pergeseran orientasi gerakan sosial yang tidak semata-mata berlandaskan tuntutan material, tetapi juga berakar pada perjuangan identitas, hak sipil, dan keberlanjutan lingkungan. NSM bertumpu pada dua teori utama: resource mobilization theory yang menekankan pentingnya modal sosial, pengetahuan, dan kemampuan dalam menopang gerakan; serta *identity-oriented theory* yang menjelaskan bagaimana kesatuan kolektif dibangun melalui identitas bersama dan ekspresi politik non-materialistik (Sukmana, 2016). Dengan demikian, keterhubungan perempuan Mandalika dengan jaringan advokasi lintas wilayah dapat dipahami sebagai praktik nyata NSM yang mengubah penderitaan lokal menjadi wacana politik nasional sekaligus memperluas arena partisipasi demokratis.

Perspektif ekofeminisme kemudian menantang keterbatasan analisis NSM dengan menambahkan dimensi ekologis dan gender. Ekofeminisme mengkritik pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan ekologi dan menyingkirkan perempuan dari ruang pengambilan keputusan (Shiva & Mies dalam Khaeroni & Halidin, 2018; Maulana & Supriatna, 2019). Relasi dominasi atas perempuan dipandang paralel dengan eksploitasi terhadap alam, yang keduanya dibentuk oleh konstruksi patriarki (Kemmerer, 2001). Krisis lingkungan sekaligus krisis gender menuntut dekonstruksi pengetahuan dan ideologi, serta penguatan pendidikan kritis yang mampu menggali nilai-nilai lokal sebagai dasar kesetaraan dan keberlanjutan (Sharnappa, 2016). Dengan demikian, bila n*ew social movement* menjelaskan strategi kolektif dan artikulasi identitas, ekofeminisme menegaskan dimensi ekologis dan etika lingkungan yang memperluas horizon politik perlawanan. Perdebatan teoretis inilah yang memperlihatkan bahwa perlawanan perempuan Mandalika tidak dapat direduksi hanya pada tuntutan ekonomi, melainkan mencerminkan pertautan antara perjuangan identitas, kesetaraan gender, dan keadilan ekologis. Dari titik ini, penting untuk menelaah bagaimana pengalaman dan gagasan tersebut dirumuskan menjadi identitas kolektif dan makna politik perlawanan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Transformatif dan Artikulatif

Identitas kolektif yang tumbuh dalam gerakan perempuan Mandalika menandai transformasi penting dalam lanskap gerakan sosial kontemporer. Jika pada awalnya mereka diposisikan semata sebagai korban pembangunan yang suaranya diabaikan, pengalaman langsung menghadapi penggusuran, kehilangan tanah maupun laut, serta eksklusi dalam pengambilan keputusan justru melahirkan kesadaran baru. Mereka tidak lagi memandang diri sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek politik dengan hak, martabat, dan legitimasi untuk menentukan arah masa depan komunitas. Kesadaran ini menjadikan penderitaan personal berubah menjadi fondasi identitas kolektif, yang kemudian memobilisasi mereka dalam perjuangan bersama. Proses ini menggeser perlawanan dari sekadar respons spontan menuju gerakan yang lebih terstruktur, menghubungkan isu ekonomi lokal dengan wacana lebih luas tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, serta pengakuan atas identitas budaya dan ekologis (Melucci, 1996; Touraine, 1985; Komnas Perempuan, 2025). Dengan demikian, identitas kolektif berfungsi sebagai sumber moral sekaligus energi simbolik yang memperkuat posisi perempuan sebagai aktor utama dalam kontestasi politik pembangunan (Fitri & Akbar, 2017).

Transformasi ini selaras dengan kerangka n*ew social movement* yang menekankan bahwa basis solidaritas gerakan tidak lagi semata didorong oleh kepentingan materialistik, sebagaimana ditekankan dalam paradigma klasik, melainkan oleh faktor ekspresif dan identitas kultural (Budiardjo, 2008; Sukmana, 2016). *New social movement*menjelaskan bahwa aktor gerakan lintas kelas dapat bersatu karena kesamaan nilai dan aspirasi, bukan sekadar posisi ekonomi. Dalam konteks perempuan Mandalika, tuntutan mereka tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga pengakuan atas martabat, budaya, dan hak-hak politik. Pergeseran ini tampak jelas dalam bahasa perlawanan: dari sekadar ungkapan “tidak mau pindah” menuju framing “perampasan tanah” yang menghubungkan pengalaman lokal dengan konflik agraria nasional dan isu hak asasi manusia global (Pradhani, 2019). Dengan demikian, gerakan ini merefleksikan pola baru n*ew social movement* yang plural, non-materialistik, serta berfokus pada isu universal seperti keadilan gender, hak lingkungan, dan demokrasi partisipatif (Hapsari, 2016; Dewi Kartika Sari & Siahainenia, 2015).

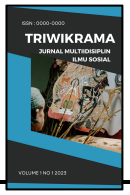
Lebih jauh, dinamika ini memperlihatkan irisan penting dengan perspektif ekofeminisme yang mengkritik pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan etika lingkungan maupun relasi gender. Seperti ditunjukkan Vandana Shiva dan Maria Mies, eksploitasi alam kerap berjalan seiring dengan marginalisasi perempuan (Khaeroni & Halidin, 2018; Maulana & Supriatna, 2019). Perempuan Mandalika, yang kehidupannya terhubung langsung dengan tanah, laut, dan ekosistem lokal, menghadapi kerentanan berlapis ketika ruang hidup mereka terampas oleh proyek pembangunan. Namun, justru pengalaman itu memperkuat posisi mereka sebagai agen pengetahuan ekologis dan pengusung paradigma pembangunan alternatif yang berkeadilan gender serta ramah lingkungan (Puspita, 2017; Kemmerer, 2001). Dengan demikian, perjuangan perempuan Mandalika tidak hanya merepresentasikan perlawanan terhadap ketidakadilan agraria, melainkan juga artikulasi politik yang menegaskan keterkaitan antara identitas, gender, dan ekologi. Gerakan ini memperlihatkan bagaimana identitas kolektif dapat bertransformasi menjadi klaim politik transformatif yang menantang hegemoni pembangunan sekaligus membuka ruang bagi model masyarakat yang lebih humanis, kultural, dan ekologis.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika telah menyingkirkan perempuan dari tanah, laut, dan ruang hidup yang selama ini menopang ekonomi serta relasi sosial mereka. Kehilangan tersebut tidak hanya memunculkan kerentanan ekonomi dan sosial, tetapi juga memperdalam eksklusi politik yang dialami perempuan. Namun, pengalaman kolektif menghadapi penggusuran dan intimidasi justru melahirkan solidaritas yang terwujud dalam pengorganisasian lokal, aksi kolektif, serta perluasan jejaring dengan organisasi perempuan, kelompok mahasiswa, dan Komnas Perempuan.

Dari proses tersebut, lahir identitas kolektif yang menandai transformasi perempuan Mandalika dari korban pembangunan menjadi subjek politik. Identitas ini terartikulasi dalam empat bingkai utama tuntutan, yakni absennya konsultasi bermakna, kegagalan pemukiman kembali, kompensasi yang tidak adil, dan ketiadaan pemulihan sosial-ekonomi. Melalui bingkai itu, perlawanan perempuan Mandalika bergerak melampaui persoalan ekonomi semata dan tampil sebagai klaim politik atas keadilan agraria, hak hidup, martabat, serta keberlanjutan komunitas.

Dengan demikian, resistensi perempuan Mandalika merefleksikan karakter gerakan sosial baru yang berbasis identitas, solidaritas, dan nilai non-material, sekaligus menegaskan relevansi perspektif ekofeminisme dalam membaca keterhubungan antara eksploitasi ekologis dan subordinasi gender. Gerakan ini memperlihatkan bagaimana pengalaman lokal dapat ditransformasikan menjadi perjuangan politik yang lebih luas, menjadikan perempuan bukan lagi objek terdampak, tetapi aktor utama dalam kontestasi politik pembangunan.

Saran

1. Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pembangunan

Pemerintah pusat dan daerah perlu menerapkan Gender Impact Assessment (GIA) sebagai instrumen wajib sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan proyek strategis nasional. Evaluasi ini penting untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak menimbulkan kerentanan baru bagi perempuan, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir.

2. Partisipasi Bermakna dan Inklusif

Mekanisme partisipasi warga harus melampaui formalitas administratif. Negara dan korporasi wajib membuka ruang konsultasi bermakna (meaningful consultation) yang memberi perempuan posisi setara dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, sesuai prinsip yang dijamin CEDAW dan UUD 1945.

3. Pemulihan Sosial-Ekonomi Berbasis Komunitas

Program pemukiman kembali perlu disertai dengan pemulihan sosial dan ekonomi yang memperhatikan kebutuhan spesifik gender. Pemulihan tidak hanya mencakup kompensasi finansial, tetapi juga penyediaan lahan produktif, akses air bersih, serta dukungan kesehatan reproduksi dan psikososial.

4. Penguatan Kapasitas dan Organisasi Perempuan Lokal

Pemerintah daerah dan lembaga masyarakat sipil perlu mendukung penguatan organisasi perempuan berbasis komunitas melalui pendidikan kritis, pelatihan advokasi, dan pendampingan hukum. Dukungan ini penting agar perempuan memiliki posisi tawar yang kuat dalam menghadapi dominasi negara maupun korporasi.

5. Integrasi Perspektif Ekofeminisme dalam Pembangunan

Kebijakan pembangunan harus mengakui keterkaitan antara keberlanjutan ekologi dan keadilan gender. Integrasi nilai-nilai ekofeminisme dapat mendorong model pembangunan alternatif yang berkeadilan ekologis, menghargai pengetahuan lokal, serta melibatkan perempuan sebagai aktor utama pengelolaan lingkungan.

6. Kolaborasi Multilevel untuk Advokasi Hak Perempuan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Penguatan jejaring lintas wilayah antara komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga negara independen seperti Komnas Perempuan harus terus dikembangkan. Kolaborasi ini berperan strategis untuk mentransformasikan pengalaman lokal menjadi agenda kebijakan nasional dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Afra, Sayyidatiihayaa. (2023). *Kehidupan Perempuan Sasak Ditelan Proyek Sirkuit Mandalika yang Maskulin.* Project Multatuli. Diakses Melalui https://projectmultatuli.org/kehidupan-perempuan-sasak-ditelan-proyek-sirkuit-mandalika-yang-maskulin/

Agarwal, B. (1994). *A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia*. Cambridge University Press.

AIIB. (2022). *Environmental and Social Review Summary – Mandalika Urban Development*.

Atikah, Amalia Risti; Siscawati, Mia; Adelina, Shelly. (2024). *Aksi Kolektif Perempuan Nelayan Puspita Bahari di Pesisir Demak: Membangun Solidaritas untuk Transformasi Sosial. Jurnal Perempuan, 29*(3)

Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik.* Gramedia pustaka utama.

Federici, S. (2012). *Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle*. PM Press.

Fitri, A. I., & Akbar, I. (2017). Gerakan sosial perempuan ekofeminisme di pegunungan kendeng provinsi jawa tengah melawan pembangunan tambang semen. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 83-102.

Fraser, N. (2009). *Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world* (Vol. 31). Columbia university press.

Hanik, U., & Khamidah, N. (2022). Ekoteologi Masyarakat Lombok dalam Tradisi Bau Nyale. Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 10(1), 131-151.

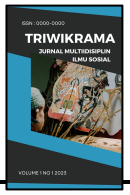
Hapsari, D. R. (2016). *Peran jaringan komunikasi dalam gerakan sosial untuk pelestarian lingkungan hidup. Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 1*(1), 25-36.

Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press.

Hendrastiti, T. K., & Irianto, S. (2020). Persistent Courage of the Local Women Resistance Toward Undemocratic Policies. ETNOSIA: *Jurnal Etnografi Indonesia, 5*(2), 229–248.

Hulfa, I., Minanda, H., & Rojabi, S. H. (2024). TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KEK MANDALIKA DI KUTA KABUPATEN LOMBOK TENGAH. J*ournal of Innovation Research and Knowledge, 4*(1), 419-430.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



Indrawasih, R., & Pradipta, L. (2021). Pergerakan sosial perempuan pesisir dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial, 5*(1), 105-117.

Keck, M. E., & Sikkink, K. A. (2014). *Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics.* Cornell University Press.

Kemmerer, L. (2001). Ecofeminist Philosophy. *The Philosophers' Magazine,* (16), 60-60.

Khaeroni, C., & Halidin, A. (2018). Pendidikan Islam Inklusif Gender (Studi Kritis Ekofeminisme Vandana Shiva).

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025). *Desak penghentian penggusuran Mandalika: Pertimbangkan partisipasi bermakna warga perempuan sebagai bentuk tanggung jawab hak asasi manusia* (Siaran Pers).

Komnas HAM. (2021). *Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Proyek KEK Mandalika*.

KPPII. (2023). *Ringkasan Eksekutif Survei Dampak Sosial KEK Mandalika*.

Maulana, R., & Supriatna, N. (2019). Ekofeminisme: Perempuan, alam, perlawanan atas kuasa patriarki dan pembangunan dunia (Wangari Maathai dan Green Belt Movement 1990-2004). *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah, 8*(2), 261-276.

Melucci, A. (1996). *Challenging Codes: Collective Action in the Information Age*. Cambridge University Press.

OHCHR. (2021). *UN Experts Alarmed at Human Rights Abuses in Mandalika Tourism Project*. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/03

Pintakami, L. B., Sukesi, K., & Yuliati, Y. (2024). *ANALYSIS THE FACTORS AFFECTING THE ROLE OF COASTAL WOMEN'S IN FOOD SECURITY AND PREVENTING BEACH ABRASION IN INDONESIA. Agricultural Socio-Economics Journal, 24*(2), 87-96.

Pradhani, S. I. (2019). Diskursus teori tentang peran perempuan dalam konflik agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, *5*(1), 69-83.

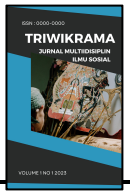
Priyatna, A., Subekti, M., & Rachman, I. (2017). Ekofeminisme dan gerakan perempuan di Bandung. *Patanjala, 9*(3), 291977.

Puspitasari, D. (2017). *Gerakan Perempuan Melawan Korporasi Tambang (Studi Perspektif Gender di Pegunungan Kendeng Utara, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Roviana, S. (2015). Pendidikan Politik Koalisi Perempuan Yogyakarta Wilayah Yogyakarta 2000-2008. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, *9*(2), 119-137.

Sari, D. K., & Siahainenia, R. R. (2015). Gerakan sosial baru di ruang publik virtual pada kasus Satinah. *Jurnal Ilmu Komunikasi, 12*(1).

Sharnappa, P. S. (2016). Reconstructing ecofeminism: A study of Kamala Markandaya's nectar in a sieve. *Cogent Social Sciences, 2*(1), 1243772.



Shiva, V. (1988). *Staying Alive: Women, Ecology and Development.* Zed Books.

Shiva, V. (1993). Ecofeminism. Zed Books.

Sukmana, O. (2016). *Konsep dan teori gerakan sosial.* Intrans Publishing.

Suryakusuma, J. I. (1987). *State Ibuism: The social construction of womanhood in the Indonesian new order* (Doctoral dissertation, Institute of Social Studies, The Hague, Netherlands).

Touraine, A. (1985). *An Introduction to the Study of Social Movements*. Social Research, 52(4), 749–787.

Törnquist, O. (2006). Assessing democracy from below: a framework and Indonesian pilot study. *Democratization, 13*(02), 227-255.

WALHI NTB. (2024). *Ambisi pembangunan KEK Mandalika, nasib warga yang terpinggirkan, ancaman kemerosotan sosial dan lingkungan bagi masyarakat lingkar kawasan.* Riset-Advokasi: Investasi China dalam pembangunan infrastruktur kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok Tengah - NTB.

Wardhani, A. A., Susilowati, I., & Nugroho, S. B. M. (2023). Empowerment of Gender-Based Small-Scale Fishers to Strengthen the Coastal Economy: Case Study Batang Regency. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 12(2).*

World Bank. (2019). *How to ensure better outcomes for women in resettlement: A toolkit.* World Bank Group.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com